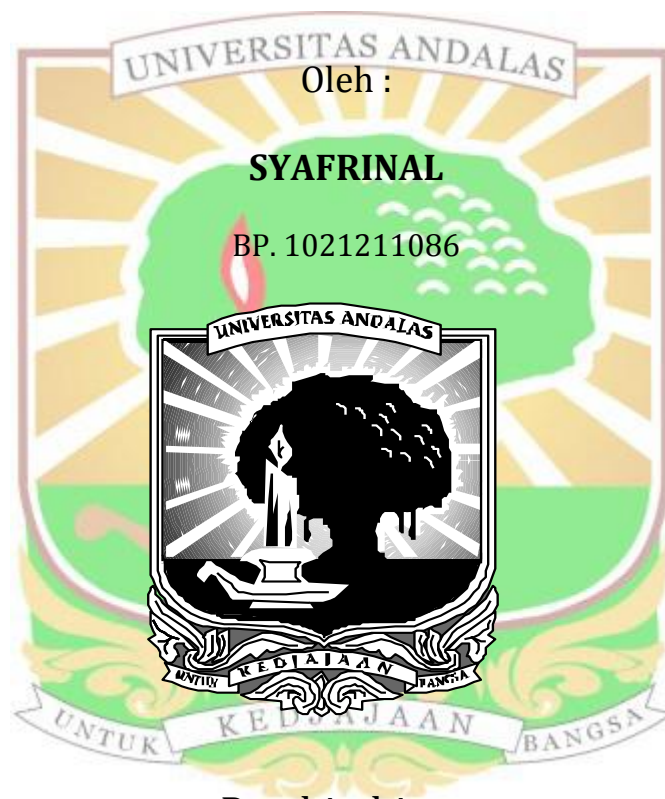


**KEDUDUKAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA POLIGAMI  
DAN HUBUNGANNYA DENGAN ASAS NEBIS IN IDEM  
(Studi kasus di Pengadilan Negeri Pasaman Barat)**

***TESIS***

Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum  
Pada Program Pascasarjana Universitas Andalas



**Pembimbing :**

**Prof.Dr. Elwi Danil, SH, MH  
Yoserwan, SH, MH, LLM**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
2017**

## ABSTRAK

Pada umumnya orang berfikir tentang perkawinan termasuk dalam ranah peradilan Agama saja tanpa berupaya mengetahui ketentuan hukum lainnya yang juga mengatur tentang perkawinan poligami yang diatur dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP).

Poligami merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) dan ini disebut juga salah satu bentuk kejahatan dalam perkawinan. Hal ini dapat dilihat dengan jelas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 279 KUHPidana yang ternyata perkawinan untuk kedua kalinya (poligami) dimasukkan dalam perbuatan pidana.

Berdasarkan pemikiran tersebut diatas penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu : *Pertama*, Bagaimanakah kedudukan putusan hakim dalam perkara poligami memenuhi maksud ketentuan hukum asas tentang pemidanaan? *Kedua*, Apakah setelah terpidana perkara poligami selesai menjalankan pidananya yang bersangkutan dibenarkan melanjutkan hubungan perkawinannya?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif* yang didukung dengan metode pendekatan *yuridis empiris* dengan tipe penelitian yang bersifat *deskriptif*. Sementara sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder yang dianalisa secara kualitatif yaitu data yang menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan seputar judul, jadi bukan berupa angka-angka dan juga ditambah dengan pengalaman pribadi penulis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : *Pertama*, Putusan hakim dalam perkara poligami yang menjadi objek penelitian ini telah menuhi maksud ketentuan hukum asas tentang pemidanaan. *Kedua*, Terdakwa bisa melanjutkan perkawinan pasca terdakwa bebas dari Lembaga Pemasyarakatan karena putusan hakim pidana tidak ada yang berjenis pembatalan atas perkawinan poligami, untuk itu disarankan kepada para hakim yang menangani perkara poligami untuk melakukan pembaharuan hukum dengan cara membatalkan perkawinan poligami atau bias juga Mahkamah Agung menerbitkan aturan berupa pengenyampingan asas *nebis in idem* dalam perkara poligami.

## ABSTRACT

In general people think about marriage included in the realm of Religious court alone without trying to know other legal provisions that also regulate the marriage of polygamy which is regulated in the Criminal Code (KUHP).

Polygamy is one of the offenses set forth in the Criminal Code (Criminal Code) and this is also called one form of crime in marriage. This can be clearly seen as referred to in Article 279 of the Criminal Code which turns out to be a second marriage (polygamy) to be included in a criminal act.

Based on the above thought the authors formulate the problems in this study, namely: First, How the position of the judge's decision in the case of polygamy fulfill the purpose of the provisions of the law of principle about punishment? Secondly, Is the convicted polygamy case finished his criminal sanction justified continue marriage relationship?

The approach method used in this research is normative juridical which supported by empirical juridical approach method with descriptive research type. While the data sources in this study are primary data and secondary data are analyzed qualitatively the data that produce descriptive data that describes around the title, so not in the form of numbers and also coupled with the author's personal experience.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded as follows: First, the judge's decision in the case of polygamy that became the object of this study has met the intention of the provisions of the law of principle about the crime. Secondly, the Defendant can continue the marriage after the defendant is free from Penal Institution because the decision of the criminal judge does not have any kind of cancellation of polygamous marriage, so it is advisable to the judges handling the polygamy case to do legal renewal by canceling the marriage of polygamy or bias also the Supreme Court publish The rule of throwing away the principle of nebis in idem in the case of polygamy.